

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

MENUJU INDONESIA EMAS :
TANTANGAN DAN PROSPEK EKONOMI DALAM
PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



DITERBITKAN OLEH :
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
<u>SESI PANEL</u>	
Mewujudkan Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan <i>Oleh Harry Azhar Aziz</i>	1-8
Pembangunan Ekonomi: Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Kelembagaan <i>Oleh Syamsul Amar B.</i>	9-14
<u>SESI PARALEL</u>	
Studi Empiris Tentang Dampak Foreign Direct Investment Tenaga Kerja dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Selama Tahun 1990 – 2010 <i>Oleh Imam Mukhlis</i>	15-36
Analysis of Consumption And Investment In West Sumatera – Indonesia <i>Oleh Hasdi Aimon</i>	37-42
Pengaruh Perspektif Resiko Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia <i>Oleh Fachruddin dan Ibnu Syahri Ramadhan</i>	43-60
Perdagangan Internasional Dalam Perspektif “ Green Economy” <i>Oleh Idris</i>	61-71
Analisis Tingkat Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi di Indonesia (Kajian Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter) <i>Oleh Suriani</i>	73-83
Peran Kapabilitas Inovasi Terhadap Perbaikan Produk Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Tekanan Lingkungan dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi <i>Oleh Rahab, Eko Yanuarto, Untung Kumorohadi</i>	85-95
The Relationship Between Inflation Rate and Unemployment Rate In Indonesia 1985 – 2008 <i>Oleh Selli Nelonda</i>	97-103
Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Selama Krisis Eropa Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia <i>Oleh Ghazali Syamni</i>	105-112
Analisis Efektifitas dan Gap Retribusi Parkir Kabupaten Malang <i>Oleh Hadi Sumarsono</i>	113-123

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF "GREEN ECONOMY"

Oleh :

Idris

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Email : idris_unp@yahoo.co.id

ABSTRACT

One of the characteristic of the economic development is globalization. The globalization process has already increased the interdependencies among countries, creating the economic integration and finally makes no more borders within world economy. Economic globalization is marked by more borderless market and investment between nations and/or regions. International trade has an important role in increasing world economic welfare. If a nation became an exporter of a particular good, the domestic producer will gain some benefit and the domestic consumer will loss. On the other hand, if the nation became an importer domestic consumer will gain benefit and producer will loss. In general the international trade will increase economic welfare since the gain from international trade dominated the loss from involving in international trade activities. When the externalities in producing goods are takes into account, the above theoretical prediction will not always true. The producing countries which do not apply the environmental rules tightly will suffer the social cost of pollution caused by the production process of exportable goods. Some developing countries tend to ignore this necessary condition in order to boost their economic growth, and If the development policy only based on economic growth, the disaster merely will be happened.

Key words: *green economy, international trade, environmental quality, sosial cost, externality, consumers surplus, producers surplus*

ABSTRAK

Salah satu bentuk perkembangan perekonomian adalah terjadinya globalisasi. Proses globalisasi telah meningkatkan saling ketergantungan antar-negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia sehingga "batas-batas" antar-negara dalam berbagai praktik usaha dan bisnis seolah-olah dianggap tidak ada lagi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, atau pun internasional. Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengeksport suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan sedangkan konsumen domestik akan dirugikan. Tetapi jika suatu negara menjadi pengimpor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan dirugikan, sedangkan konsumen domestik barang tersebut akan diuntungkan. Secara keseluruhan pembukaan perdagangan internasional akan menguntungkan suatu negara baik sebagai pengeksport maupun sebagai pengimpor, karena keuntungan yang diperoleh melebihi kerugiannya. Namun bila diperhitungkan masalah eksternalitas dalam kegiatan produksi suatu barang maka hasilnya akan menjadi lain. Negara produsen yang tidak menerapkan aturan lingkungan secara ketat, akan memikul biaya sosial akibat pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan produksi barang yang dieksport

tersebut. Beberapa negara sedang berkembang cenderung menerapkan aturan lingkungan tidak ketat, karena negara tersebut sedang berusaha meningkatkan pertumbuhannya. Bila kebijakan pembangunan suatu negara hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, maka malapetaka akan terjadi.

PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya perekonomian dunia, tidak mungkin suatu negara menganut perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak mengenal transaksi perdagangan luar negeri dan bentuk-bentuk lainnya dari hubungan ekonomi antar negara. Dalam perekonomian terbuka, perdagangan internasional merupakan salah satu bagian penting yang menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. Keberhasilan perdagangan internasional dalam menggerakkan perekonomian tersebut terlihat dari rasio ekspor dan impor terhadap total GNP. Jika rasio ekspor-impor terhadap GNP melebihi 50%, maka perekonomian suatu negara dinyatakan lebih terbuka. Dengan adanya perekonomian terbuka, maka setiap negara akan berkonsentrasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif saja.

Sejak dasawarsa 1970-an, telah terjadi suatu perubahan yang sangat mendasar dan memiliki kecenderungan jangka panjang, yang dikenal dengan istilah globalisasi. Proses globalisasi telah menimbulkan suatu keadaan, dimana hubungan saling ketergantungan antar negara semakin tinggi, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia sehingga "batas-batas" antar negara dalam berbagai praktik usaha dan bisnis seolah-olah dianggap tidak berlaku lagi. Globalisasi dalam perekonomian merupakan proses yang memperlihatkan hanya ada satu pasar, dengan ciri keterkaitan dan saling ketergantungan ekonomi antara suatu negara dan negara lainnya yang semakin kuat. Bahkan, keterkaitan dan saling ketergantungan tersebut terjadi bukan hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga pada bidang sosial, budaya dan lain-lainnya. Globalisasi ekonomi juga ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, atau pun internasional.

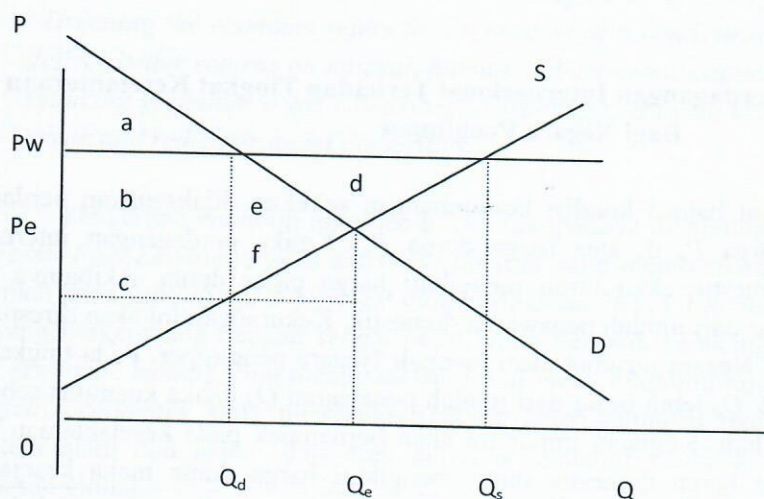
Dalam prakteknya globalisasi cenderung memperkaya negara-negara maju yang sejak lama telah menguasai sumber daya ekonomi strategis, seperti modal, teknologi, dan informasi sehingga jurang perbedaan antara kelompok negara kaya dan miskin semakin curam. Dengan menganut perekonomian terbuka di era globalisasi seperti sekarang ini, suatu negara dituntut untuk siap dalam menghadapi berbagai perkembangan secara cepat dari segala sektor, termasuk sektor perdagangan, baik domestik maupun internasional. Selain itu, pada era globalisasi, Indonesia yang memiliki pasar domestik yang sangat besar, akan dimasuki oleh produk-produk asing sehingga tingkat persaingan akan semakin tinggi. Indonesia harus dapat bersaing di pasar domestik dan mampu melakukan penetrasi ke pasar global agar pada masa mendatang Indonesia tidak menjadi penonton di negeri sendiri.

Berdasarkan pemikiran di atas, ada beberapa masalah yang perlu didiskusikan, antara lain: apakah pembukaan perdagangan internasional oleh suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Bagaimana pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan produksi barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional? Bagaimana konsep *green economy* diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan? Dan bagaimana dampak perdagangan internasional terhadap kualitas lingkungan suatu negara dalam perspektif *green economy* baik sebagai pengekspor maupun sebagai pengimpor suatu barang?

PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Salah satu masalah yang dihadapi oleh suatu negara perekonomian terbuka adalah apakah negara tersebut akan menjadi pengimpor atau pengeksportor suatu produk tertentu. Jawaban permasalahan ini bergantung pada harga suatu barang tertentu di pasar domestik dan negara lain atau harga pasar dunia (*world price*). Bila harga pasar dunia lebih tinggi dari pada harga domestik, maka ketika perdagangan internasional dibuka negara tersebut akan cenderung menjadi pengeksportor. Sebaliknya bila harga dunia untuk suatu jenis barang tertentu lebih rendah dari pada harga pada pasar domestik, tentu ketika perdagangan internasional dibuka maka negara tersebut akan cenderung menjadi pengimpor barang yang sama. Artinya, dengan membandingkan harga dunia dan harga domestik sebelum melakukan perdagangan internasional, keunggulan komparatif akan diketahui. Bila harga domestiknya lebih rendah dari pada harga dunia, berarti negara pengeksportor memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut. Sebaliknya, jika harga domestiknya tinggi berarti keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut dimiliki oleh negara-negara lain (Mankiw, 2006).

Keputusan suatu Negara untuk masuk dalam perdagangan internasional baik sebagai pengeksportor maupun sebagai pengimpor akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Untuk menggambarkan bagaimana dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan negara pengeksportor dapat diilustrasikan pada gambar 1 berikut ini.

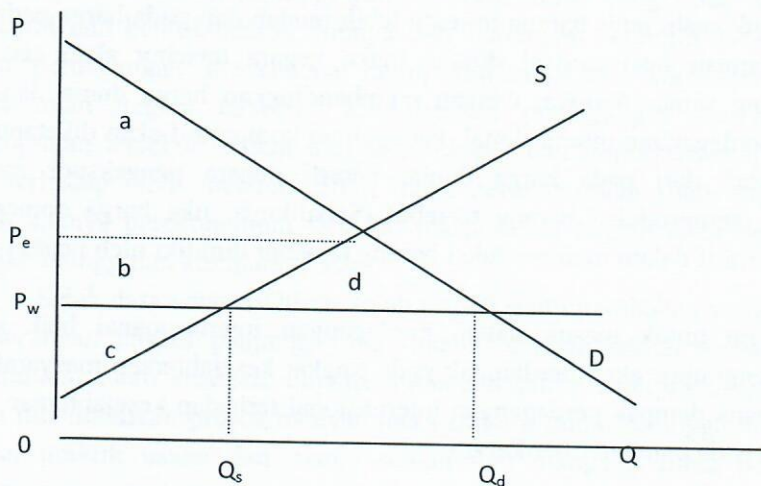


Gambar 1 : Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Tingkat Kesejahteraan Bagi Negara Pengeksportor

Pada gambar 1 terlihat bahwa kondisi keseimbangan sebelum dilaksanakan perdagangan internasional terletak pada harga P_e dibawah harga dunia P_w . Ketika perdagangan internasional dilaksanakan, maka harga domestik akan naik mengikuti harga pasar dunia. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi penjual yang bersedia menerima harga yang lebih rendah dari harga dunia, dan tidak ada pula pembeli yang bersedia membayar lebih tinggi dari harga dunia. Pada tingkat harga P_w jumlah penawaran Q_s lebih besar dari jumlah permintaan domestik Q_d , maka kuantitas sebesar $Q_s - Q_d$ akan dieksport ke Negara lain. Kegiatan ekspor ini akan berdampak pada kesejahteraan Negara pengeksportor tersebut. Pada saat harga domestik naik menyesuaikan dengan harga dunia maka kesejahteraan produsen akan meningkat. Peningkatan kesejahteraan produsen tersebut ditunjukkan oleh kenaikan

surplus produsen yang naik dari area $c+f$ menjadi $c+f+b+e+d$ atau terdapat kenaikan sebesar area $b+e+d$. Sementara surplus konsumen turun dari area $a+b+e$ menjadi area a atau terdapat penurunan sebesar area e . Secara keseluruhan terdapat peningkatan kesejahteraan Negara pengekspor sebesar area d . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bila suatu Negara ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka keputusan melaksanakan perdagangan internasional adalah merupakan keputusan yang tepat.

Sedangkan untuk menggambarkan bagaimana dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan bagi Negara pengimpor dapat diilustrasikan pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2 : Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Tingkat Kesejahteraan Bagi Negara Pengimpor

Pada gambar 2 terlihat bahwa kondisi keseimbangan sebelum dilaksanakan perdagangan internasional terletak pada harga P_e di atas harga dunia P_w . Ketika perdagangan internasional dilaksanakan, maka harga domestik akan turun mengikuti harga pasar dunia. Akibatnya jumlah permintaan domestik lebih besar dari jumlah penawaran domestik. Kekurangan ini akan direspon oleh produsen luar negeri, sehingga Negara tersebut akan menjadi Negara pengimpor. Pada tingkat harga P_w jumlah permintaan domestik Q_d lebih besar dari jumlah penawaran Q_s , maka kuantitas sebesar $Q_d - Q_s$ akan diimpor dari Negara lain. Kegiatan impor ini akan berdampak pada kesejahteraan Negara pengimpor tersebut. Pada saat harga domestik turun mengikuti harga dunia maka kesejahteraan konsumen akan meningkat. Peningkatan kesejahteraan konsumen tersebut ditunjukkan oleh kenaikan surplus konsumen, naik dari area $a+b$ menjadi $a+b+c+d$ atau terdapat kenaikan sebesar area $b+d$. Sementara surplus produsen turun dari area $c+e$ menjadi area e atau terdapat penurunan sebesar area b . Secara keseluruhan terdapat peningkatan kesejahteraan Negara pengimpor sebesar area d . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bila suatu Negara ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka keputusan melaksanakan perdagangan internasional adalah merupakan keputusan yang tepat.

KONSEP GREEN ECONOMY

Ekonomi hijau (*green economy*) sebagai paradigma baru model ekonomi muncul mulai tahun 2009 dan mengusung pembangunan rendah karbon setelah traktat global Protokol Kyoto tentang perubahan iklim makin sulit direalisasikan. Sebagai manifestasi konsep pembangunan berkelanjutan,

ekonomi hijau mengikat pembangunan agar berbasis efisiensi penggunaan sumber daya, pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan internalisasi biaya lingkungan dan sosial. Selain merevolusi proses pembangunan, implementasi ekonomi hijau juga menuntut adanya perubahan gaya hidup, terutama dalam berkonsumsi.

Ekonomi hijau bukan lagi merupakan suatu representasi tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan sudah menjelma menjadi suatu strategi bisnis baru yang mampu mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan, sehingga ekonomi hijau sudah menjadi keharusan bagi dunia usaha untuk diimplementasikan. Ekonomi hijau diyakini memiliki beberapa manfaat diantaranya efisiensi melalui pengurangan biaya operasi, memperkuat *brand value* dan menciptakan daya saing perusahaan di tengah persaingan usaha. Karena itu dunia usaha didorong untuk tidak merasa ragu menerapkan aktivitas ramah lingkungan dalam kegiatan bisnisnya. Pada saatnya aktivitas hijau tersebut akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga internalisasi lingkungan ke dalam kegiatan bisnis sudah merupakan suatu keharusan masa depan (Djajadiningrat, dkk 2011).

Pendekatan kebijakan ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar untuk meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, termasuk diantaranya menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*). Ekonomi hijau merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Walaupun konsep ekonomi hijau masih menjadi perdebatan, namun beberapa lembaga internasional sudah mulai mendefinisikan konsep ini. UNNEP (2009) green economic adalah :

“Greening the economy refers to the process of reconfiguring business and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investment, while at same time reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural resources, reating less waste and reducing social disparities”.

Pengertian ekonomi hijau lebih luas cakupannya dibandingkan *Low-Carbon Economy* atau *Low-Fossil-Fuel Economy*, yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan output minimal terhadap emisi gas rumah kaca yang dilepas(UNNEP dalam Makmun 2011). Ekonomi hijau adalah model ekonomi baru yang berkembang dengan sangat pesat, yang bertolak belakang dari model ekonomi sekarang (*black economic model*) yang menggunakan *fossil fuels*. Ekonomi hijau didasarkan pada pengetahuan *ecological economics* yang membahas tentang ketergantungan manusia seara ekonomis terhadap ekosistem alam dan akibat dari efek aktivitas ekonomi manusia terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Lebih tegas UNNEP (Makmun, 2011) menyatakan bahwa penerapan ekonomi hijau dilihat melalui; (1) peningkatan *investasi public* dan *private* di sektor hijau, (2) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan kerja di sektor *green*, (3) peningkatan GDP dari sektor *green*, (4) penurunan penggunaan eneregi/sumberdaya per unit roduksi, (5) penurunan level CO₂ dan polusi/GDP, dan (6) penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah. Bentuk implementasi kebijakan yang *pro green-economy* pada level internasional antara lain dalam bentuk; (1) perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral untuk jalur barang dan jasa yang berhubungan dengan lingkungan, (2) bantuan internasional untuk mendukung penerapan ekonomi hijau, (3) aktivitas pasar karbon global, (4) pengembangan pasar global untuk *service* ekosistem, (5) pengembangan dan transfer treknologi yang ramah lingkungan, dan (6) koordinasi internasional dalam implementasi paket stimulus *green*.

Pendekatan kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu menggantikan kebijakan-kebijakan lingkungan yang pada masa lampau kerap difokuskan pada solusi jangka pendek. Bahkan lewat pendekatan baru kebijakan ekonomi ini menurutnya mampu bisa menekankan aspek "pelestarian lingkungan" dan "pertumbuhan ekonomi". "Model pendekatan ekonomi hijau ini juga juga mampu

menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global.”.

Ekonomi, diketahui terkait dengan kuantitas, kompetisi, dan perluasan, sementara di sisi lain berkaitan dengan kualitas kerja sama dan konservasi. Alam adalah suatu siklus, sedangkan industri berlangsung linier. Maka kuncinya adalah bagaimana membuat umat manusia “berkeadilan ekologi” untuk mengubah pola ekonomi yang linier menjadi menjadi siklus. Dengan demikian bahan dasar, proses, produk, dan limbah bisa diefektif-efisienkan agar berkelanjutan. Dalam hal ini masalah yang menjadi biang keladi permasalahan lingkungan juga menjadi solusinya.

INTERNALISASI BIAYA LINGKUNGAN KEGIATAN PRODUKSI BARANG YANG DIPERDAGANGKAN

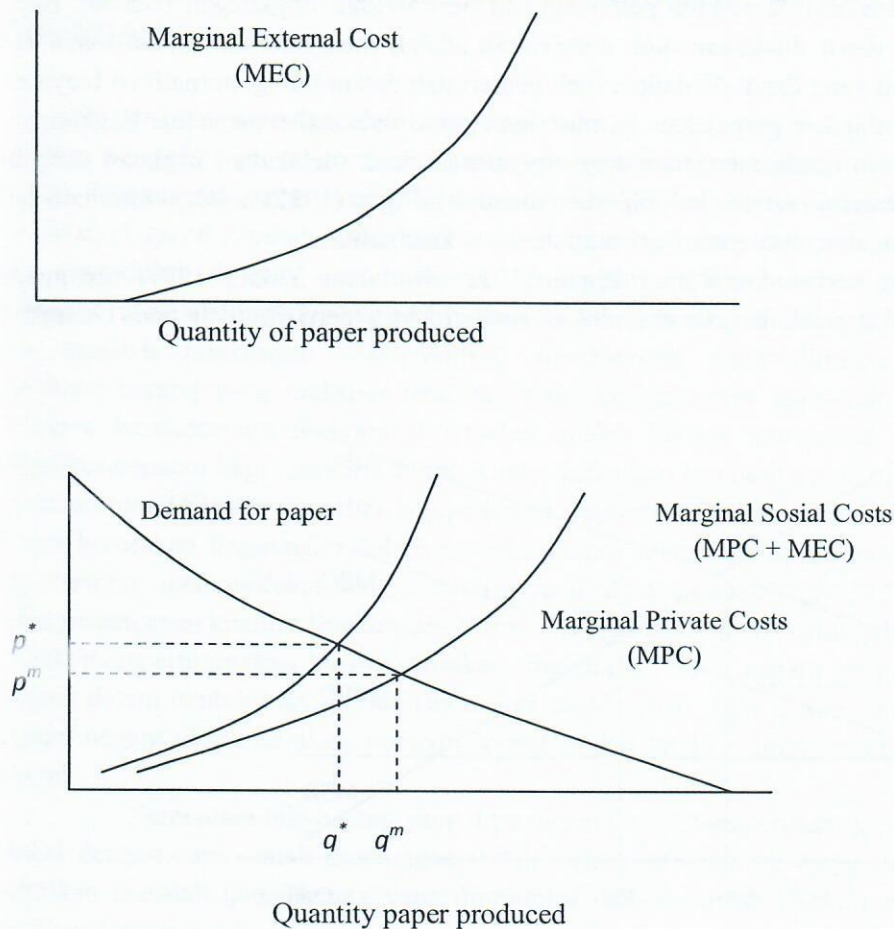
Barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional dihasilkan dari suatu rangkaian kegiatan produksi. Pada sistem ekonomi pasar, ketika pengusaha membuat keputusan tentang apa yang akan diproduksi dan bagaimana memproduksi suatu barang, secara normal yang diperhitungkan hanya pengeluaran untuk tenaga kerja, bahan baku, mesin, energi dan biaya produksi tidak langsung lainnya. Semua pengeluaran tersebut diperhitungkan sebagai harga pokok produksi yang disebut sebagai “private cost”. Private cost ini sudah tercermin dalam harga pasar produksi. Karena semua perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, tentu produsen akan berusaha menjaga agar biaya produksinya serendah mungkin (Idris, 2012b).

Pada berbagai kegiatan produksi terdapat jenis biaya lain, yang belum tercermin dalam laporan rugi laba perusahaan yang disebut sebagai biaya eksternal. Biaya tersebut merupakan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, tapi tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Biaya ini bagi masyarakat merupakan biaya internal, sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya eksternal (Field, 1997).

Salah satu tipe utama biaya eksternal adalah biaya yang muncul pada masyarakat karena kerusakan atau degradasi lingkungan. Misalnya suatu pabrik, selain menghasilkan produk yang dijual kepada konsumen juga menghasilkan limbah. Limbah tidak bisa dijual kepada konsumen sehingga harus dibuang ke sungai atau lingkungan. Akibatnya beberapa manfaat dari sungai tersebut akan hilang, namun beberapa manfaat lainnya masih bisa digunakan, tetapi dibutuhkan penanganan sebelum digunakan. Setelah limbah dibuang ke sungai, maka akan muncul biaya sosial masyarakat berupa biaya penanganan limbah sebelum air sungai dapat digunakan kembali. Hilangnya beberapa manfaat dari sungai tersebut akibat kegiatan produksi seperti penurunan pemandangan yang indah dan manfaat domestik lainnya. Karena biaya riil ini ditanggung oleh masyarakat, maka tidak diperhitungkan dalam penyusunan laporan rugi laba perusahaan. Dalam hal ini biaya yang dipikul oleh masyarakat tersebut dikenal sebagai eksternalitas disekonomi. Agar perusahaan harus memproduksi pada tingkat output yang efisien secara sosial, maka keputusan tentang penggunaan sumberdaya harus memperhitungkan kedua jenis biaya yaitu biaya internal (Private cost) dan biaya eksternal (Idris, 2012b). Dalam istilah *social cost accounting* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Biaya sosial} = \text{Private cost} + \text{eksternal (environmental) cost}$$

Hubungan antara biaya tingkat produksi dan biaya eksternal digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 : External Cost and Market Outcomes
(Sumber : Field, 1997)

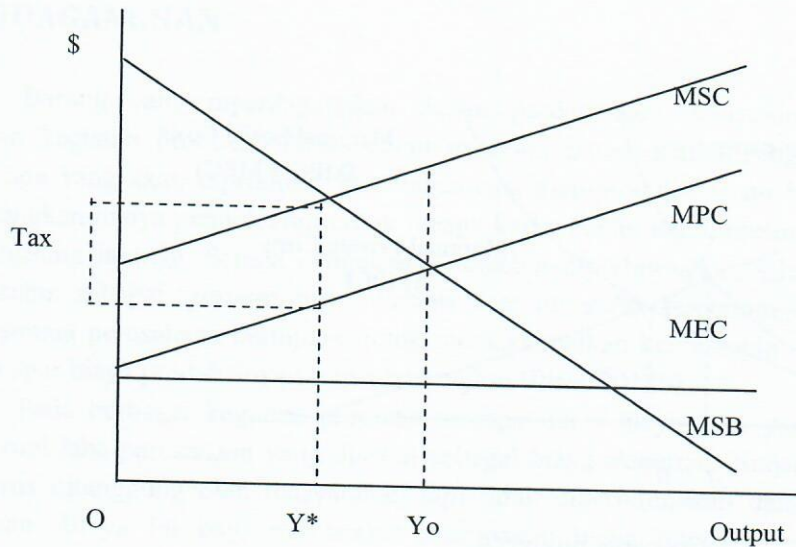
Gambar 3 bagian atas menunjukkan hubungan antara tingkat produksi dan biaya produksi eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya eksternal marginal sejalan dengan peningkatan produksi kertas. Sementara gambar bagian bawah menunjukkan kurva permintaan kertas dan biaya private marginal dari produksi kertas yang berpotongan pada tingkat harga p^m dan kuantitas sebesar q^m . Ini merupakan harga dan kuantitas yang terjadi pada suatu pasar persaingan di mana produsen tidak memperhatikan biaya eksternal. Tetapi biaya sosial marginal berdampak lebih tinggi, seperti ditunjukkan oleh kedua biaya, yaitu biaya *private* marginal dan biaya eksternal marginal. Tingkat efisiensi secara sosial tercapai pada output q^* , dan harga p^* .

Bila dibandingkan antara dua tingkat output dan dua harga, terlihat bahwa output pasar lebih tinggi dari tingkat output yang efisien secara sosial. Dan harga pasar lebih rendah dari harga efisien secara sosial. Rendahnya harga pada tingkat output pada pasar persaingan disebabkan karena biaya riil yang muncul akibat kemerosotan fungsi lingkungan belum diperhitungkan dalam harga pasar dan biaya eksternal tersebut ditanggung oleh masyarakat. Bila biaya eksternal tersebut diperhitungkan sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang, dan ditambahkan pada biaya private, maka harga barang akan meningkat. Peningkatan harga barang akan mengakibatkan permintaan akan barang berkurang sehingga tercapai tingkat yang efisiensi secara sosial.

Secara sederhana antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup terkesan kontradiktif, atau dengan kata lain harus ada yang dikorbankan. Agar jangan ada yang dikorbankan, maka kebijakan mengejar pertumbuhan ekonomi harus diintegrasikan dengan upaya

pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan paradigma pembangunan berwawasan lingkungan tersebut, maka salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menginternalisasikan biaya eksternal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menginternalisasi biaya eksternal adalah menerapkan kebijakan perpajakan. Pembebanan pajak pada setiap pencemar lingkungan adalah merupakan suatu upaya untuk mengatasi agar sipencemar tidak melakukan kegiatan yang merusak lingkungan. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Pigou (1932), sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi kegagalan pasar yang berkaitan dengan eksternalitas

Selanjutnya, secara konseptual Pigou (1932, di dalam Yakin, 1997) menggambarkan hubungan antara tingkat pajak dan efisiensi alokasi sumberdaya seperti disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4 : Tax and efficiency allocation of resources

Gambar 4 menunjukkan situasi di mana produsen tidak menanggung semua biaya (termasuk biaya lingkungan atau sosial) sehingga *marginal private cost* (MPC)- nya lebih rendah dari *marginal social cost* (MSC) nya. Selisih antara MPC dan MSC adalah merupakan *Marginal External Cost* (MEC) per unit produk yang dihasilkan, yang dalam analisis ini dianggap konstan. Bila tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan, maka produsen akan berproduksi pada tingkat Y_0 , yaitu lebih besar dari Y^* . Dengan dikenakan pajak terhadap produsen yang menyebabkan polusi, sehingga produksi cenderung akan turun pada tingkat optimal (Y^*), yaitu pada tingkat di mana *Marginal Social Benefit* (MSB) = MSC.

Akibat pembebanan pajak lingkungan ini, maka biaya produksi akan meningkat dan akan mendorong perusahaan untuk mengurangi hasil produksi sehingga lingkungan akan menjadi lebih bersih. Pajak yang terkumpul akan dipergunakan untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan, sehingga biaya eksternal yang sebelumnya dipikul oleh masyarakat yang tidak mengambil manfaat dari kegiatan agen ekonomi, sekarang telah dipikul oleh agen ekonomi (produsen) yang melaksanakan kegiatan produksi. Tentu pada gilirannya produsen ini akan memperhitungkan pajak ini pada harga pokok produksinya dan dengan sendirinya akan meningkatkan harga pasar produk.

PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN

Dengan adanya perdagangan internasional, barang akan mengalir dari suatu Negara ke Negara lain. Dalam perspektif *green economy*, barang yang mengalir tersebut dapat berupa barang yang diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan atau dengan cara yang merusak lingkungan yang dikenal sebagai *green product*. Bila barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional tersebut diproduksi dengan cara merusak lingkungan (tidak ramah lingkungan) tentu akan menimbulkan masalah lingkungan pada Negara di mana barang itu diproduksi (negara eksportir). Adanya masalah lingkungan (*eksternalitas dis-ekonomi*) yang ditimbulkan akibat kegiatan memproduksi barang yang diekspor tersebut, maka kesejahteraan masyarakatnya akan berkurang. Pengurangan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah berupa munculnya tambahan biaya atau hilangnya kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan. Bagi Negara konsumen (Negara importir) kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat, karena terhindar dari biaya kerusakan lingkungan dalam mengkonsumsi suatu barang tertentu. Artinya bila Negara importir tersebut memproduksi sendiri barang yang akan dikonsumsinya, tentu akan menghadapi persoalan penanganan kualitas lingkungan. Namun dengan mengimpor barang dari Negara pengekspor yang tidak memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan, tentu negara pengimpor akan mendapat keuntungan dalam bentuk biaya terhindarkan (*avoidable cost*). Bila kondisi ini terjadi tentu kualitas lingkungan negara eksportir akan semakin menurun dan kualitas lingkungan negara importir akan terlindungi.

Sementara bila barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional tersebut diproduksi dengan cara ramah lingkungan (telah terjadi internalisasi biaya lingkungan) tentu akan menimbulkan masalah lain. Barang yang diproduksi dengan ramah lingkungan akan menghasilkan produk hijau (*green product*), maka harga pokoknya akan mengalami kenaikan. Bila harga pokoknya naik sampai melebihi harga pasar dunia, tentu konsumen Negara lain tidak akan mau membeli produk tersebut (kalau yang dipertimbangkannya hanya masalah kualitas dan harga). Jika yang dipertimbangkan oleh konsumen tidak hanya masalah harga dan kualitas saja, melainkan juga mempertimbangkan apakah produk tersebut diproduksi dengan cara ramah lingkungan, tentu masalahnya menjadi berbeda. Konsumen yang bersedia membeli produk yang ramah lingkungan walaupun harganya tinggi adalah konsumen hijau atau *green consumers*. Idris (2012b) menyimpulkan bahwa *green consumers* adalah konsumen yang bersedia untuk mengorban konsumsi lain demi perlindungan lingkungan. Untuk mengenal apakah produk tersebut diproduksi dengan cara ramah lingkungan atau tidak tentu perlu diberi tanda atau label, yang dikenal sebagai ekolabeling.

Dalam perspektif *green economy*, pada waktunya nanti akan muncul suatu kondisi dimana konsep keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional akan berkembang menjadi keunggulan komparatif dalam menghasilkan *green product*. Kondisi ini terjadi karena pola konsumsi masyarakat internasional telah berubah menjadi *green konsumerisme*. *Green product* yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional dihasilkan oleh produsen *green corporation*. Konsep pemasaran yang diterapkan dalam menjalankan bisnis tentu telah berubah *marketing concept* menjadi *societal marketing concept*. Selanjutnya untuk pengembangan usaha *Green corporation* dibutuhkan modal dari investor *green investment*.

Dalam beberapa hal, Negara maju menginginkan agar memberikan perhatian yang lebih terhadap kualitas lingkungan, namun dalam kenyataannya perekonomian mereka tidak lepas dari adanya persaingan pasar internasional dimana produsen dalam negeri mendesak pemerintah agar bersedia memperlonggar peraturan yang melindungi lingkungan. Walaupun sudah terdapat kesamaan dalam peraturan, tetapi terdapat perbedaan dalam hal baku mutu, norma-norma sosial dan kebudayaan.

Selain itu kesenjangan antara negara maju dan negara sedang berkembang terlihat sangat jelas, dimana pemerintah negara sedang berkembang bekerja keras untuk memperbaiki undang-undang lingkungan di satu pihak, tapi dipihak lain negara sedang berkembang masih banyak yang bersedia menerima bahan buangan dari negara maju demi pertumbuhan ekonominya (Suparmoko, 2000).

Pada saat pembangunan ekonomi telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, maka masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan mengendalikan kualitas lingkungan. Selain itu kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut juga akan dapat dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas lingkungan yang sehat. Pada masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan akan muncul kebutuhan akan lingkungan yang baik, sehingga pada gilirannya masyarakat akan mau mengorbankan konsumsi barang lain demi perlindungan lingkungan. Bila keadaan tercapai maka pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan diikuti oleh indeks kualitas lingkungan yang semakin tinggi pula. Grossman dan Krueger (1995) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal membawa pada fase penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya peningkatan pendapatan akan menuju pada fase peningkatan kualitas lingkungan.

PENUTUP

Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan (peningkatan surplus produsen) sedangkan konsumen domestik akan dirugikan (penurunan surplus konsumen). Tetapi jika suatu negara menjadi pengimpor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan dirugikan (penurunan surplus produsen), sedangkan konsumen domestik barang tersebut akan diuntungkan (peningkatan surplus konsumen). Secara keseluruhan pembukaan perdagangan internasional akan menguntungkan suatu negara baik sebagai pengekspor maupun sebagai pengimpor, karena keuntungan total yang diperoleh melebihi kerugian totalnya. Namun bila diperhitungkan masalah eksternalitas dalam kegiatan produksi suatu barang maka hasilnya akan menjadi berbeda. Negara produsen yang tidak menerapkan aturan lingkungan secara ketat, akan memikul biaya sosial akibat pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan produksi barang yang diekspor tersebut. Sementara negara pengimpor akan mendapat keuntungan karena tidak ikut menanggung biaya kerusakan lingkungan. Beberapa negara sedang berkembang cenderung menerapkan aturan lingkungan tidak ketat, karena negara tersebut sedang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan maka negara pengekspor harus menginternalkan biaya eksternal melalui kebijakan perlindungan lingkungan dengan pendekatan mekanisme pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnani, B., Gutiérrez, M.-J., and Iza, A. 2005. Growth in overlapping generation economies with non-renewable resources. *Journal of Environmental Economics and Management*, 50(2):387 – 407.
- Cato, M. S. 2009. *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*. Earthscan, London.
- Djajadiningrat, ST, Hendriani Yeni, dan Famiola Melia. 2011. *Ekonomi Hijau (Green Economy)*, Penerbit Rekayasa Sains. Bandung.
- Field, Barry C. 1997 *Environmental Economics, An Introductions*. The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Idris, 1998. *Penerapan Konsep Green GDP Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasinya di Indonesia*, Buletin IKIP Padang
- , 2003. *Penerapan Konsep Sustainable Development Sebagai Langkah Strategis Untuk Mempersiapkan Masa Depan Bangsa*, Artikel Jurnal ECONOMAC Volume II No. 2 FE UNP Padang.
- , 2010. *Implementasi "Clean Development Mechanism" Di Sektor Energi*, Artikel, Jurnal ECONOMAC, Volume Nomor FE UNP Padang.
- , 2012a, *Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Pereusahaan Terhadap Lingkungan Di Era Green Market*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tanggal 14-15 Maret 2012.
- , 2012b. *Internalization of the external cost to reach the rates of output that are socially efficient*, Presented on the International Conference at Bung Hatta University on February 11, 2012.
- , 2012c, *Environmental Kuznets Curve : Bukti Empiris Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tanggal 7 Juni 2012
- Makmun, 2011. *Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan*, Artikel Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI, Vol.XIX(2) 2011. Hal 1-15.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Priciples of Economics (Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit Salemba, Jakarta
- Perman,R. et. al. (2003). *Natural Resource and Environmental Economics*, Third edition Pearson Education Limited, Printed and bound by Ashford Colour Press Ltd., Gosport.
- Soedomo, Sudarsono, 2010. *Ekonomi Hijau: Pendetan Sosial, Kultural, dan Teknologi*, Disampaikan pada diskusi "Konsep Ekonomi Hijau/Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Untuk Indonesia, di Kantor Bappenas Jakarta 14 Juli 2010.
- Tietenberg, Tom. 1992. *Environmental and Natural Resources Economics*. New York, USA : Harper Collins Publishers Inc.
- Yakin, Addinul. 1997. *Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan: Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Akademika Presindo, Jakarta